

MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTUR

Oleh: Khaerudin Kurniawan

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* memposisikan kewenangan seluruh urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota). Kewenangan yang tersisa pada pemerintah pusat dan provinsi hanya sebatas besarnya saja (lihat PP Nomor 25 Tahun 2000).

Pergeseran struktur kewenangan sistem manajemen pendidikan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi dan transformasi sistem manajemen pendidikan di sekolah (*school based management*). Sebab, pembangunan pendidikan yang selama ini didominasi oleh pemerintah pusat terbukti kurang efektif dan tidak efisien. Hal ini tampak pada berbagai program investasi perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas yang telah dilakukan selama ini belum dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, otonomi – sistem dan manajemen – pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Misi utama otonomi daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah, bukan untuk memindahkan masalah dari pusat ke kabupaten/kota. Demikian juga otonomi pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat (*education for all*), bukan memindahkan atau mengembangbiakkan masalah pendidikan yang menjadi beban pemerintah pusat ke kabupaten/kota.

Jika hal itu dapat dijalankan dengan baik dan benar, maka dipastikan akan terwujud sebuah masyarakat yang diidamkan, yaitu masyarakat berbudaya (*civilized society*), sebuah masyarakat yang peran serta dan kontrol dari setiap anggotanya begitu besar. Pada taraf inilah keberagaman budaya lokal menjadi suatu kekuatan bagi tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, slogan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang selama ini hanya menjadi hiasan bibir, dapat menemukan wujud aktualisasinya yang tepat.

Upaya mewujudkan pendidikan yang berdimensi multikultural dalam arti luas perlu dimantapkan agar sejalan dengan perkembangan sosial-budaya masyarakat, sumber daya manusia yang dapat melakukan adaptasi, mengembangkan daya cipta, karya, karsa, dan kreatif dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).

Manusia senantiasa hidup dalam kelompok yang terdiri atas sejumlah anggota masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal kehidupannya, manusia mengembangkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota demi ketertiban pergaulan sosial-budaya mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya berupa perangkat nilai, norma sosial, ataupun pandangan hidup yang terpadu dalam sistem budaya yang berfungsi sebagai rujukan hidup para anggotanya. Rujukan hidup itu melalui proses belajar, diwariskan kepada generasi penerus yang akan melestarikan dan mengembangkannya. Dengan demikian, kelangsungan hidup suatu kelompok sosial pada suatu masyarakat secara disengaja atau tidak senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.

Berbagai cara dapat dilakukan masyarakat untuk mendidik para anggotanya, misalnya, menceritakan dongeng-dongeng, mitos, menanamkan etika sosial dengan cara memberi tahu dan memberi contoh (keteladanan), dan/atau menegur. Kegiatan pendidikan tersebut, kini semakin meluas dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan

menggunakan alat bantu (media) yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi modern.

Mengingat bahwa kebudayaan selalu berkembang, tidak mustahil secara perlahan-lahan membawa pergeseran norma-norma dan tata nilai. Lebih dari itu, perkembangan dimaksud bahkan mungkin dapat terjadi dengan cepat akibat dari kemajuan yang pesat di bidang ipteks, perkembangan peradaban dunia yang semakin transparan, dan dapat diikuti setiap saat melalui teknologi telekomunikasi dan informasi yang semakin canggih.

Sehubungan dengan itu, agar terdapat kesinambungan yang serasi dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Indonesia, kiranya perlu dipikirkan dari sekarang norma-norma dan tata nilai kehidupan yang dapat menjadi pedoman dalam merumuskan ciri-ciri logika, etika, estetika, dan keterampilan yang akan ditumbuhkan melalui proses pendidikan nasional Indonesia. Norma-norma dimaksud sudah tentu harus merupakan kesepakatan bersama dari bangsa Indonesia sendiri, kendatipun di dalamnya mungkin terdapat juga nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal.

Pendidikan itu juga harus dapat mempersiapkan generasi muda sebagai anggota masyarakat yang tidak sekadar menerima dan mematuhi pola-pola kehidupan sosial yang berlaku, tetapi juga harus dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan masa depan. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya dapat merangsang kreativitas budaya peserta didik untuk beradaptasi secara aktif dengan lingkungannya, dan manajer pendidikan di daerah hendaknya tanggap dalam melihat dan mengikuti kenyataan sosial budaya yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan.

Pendidikan dan Kebudayaan

Mengingat pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan berkaitan dengan keberlangsungan tersebut, maka pendidikan dapat dikatakan merupakan suatu proses. Suatu proses belajar mengajar yang membiasakan para warga masyarakat sedini mungkin untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai hal yang terpuji, dikehendaki, dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan diri pribadi, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

Di kepulauan Nusantara yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini hidup lebih dari 500 suku bangsa yang mengembangkan kebudayaan dan tradisi masing-masing secara tersendiri. Kemajemukan suatu masyarakat seringkali diabaikan orang, dalam usaha pembangunan suatu bangsa. Orang mengabaikan adanya kemungkinan pengelompokan-pengelompokan sosial di dalamnya yang di samping membantu kelancaran bermasyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti pertentangan dan permusuhan antarkelompok dalam setiap kesatuan sosial, perbedaan pandangan/pendapat, dan lain-lain.

Pertentangan dan permusuhan antarkelompok dalam setiap kesatuan sosial dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain perbedaan kepentingan antara mereka yang berusaha untuk mengatasi perbedaan dalam mengembangkan kesatuan dengan mereka yang berusaha mempertahankan perbedaan-perbedaan dalam membangun persatuan. Oleh karena itu, dinamika sosial budaya sebagai akibat pergaulan antarsuku atau golongan dalam suatu masyarakat yang majemuk (*plural*) tidak dapat diabaikan. Di samping akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial, juga dapat memacu perubahan ke arah pembaharuan yang justru dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa.

Perlu disadari pula bahwa dalam kaitannya dengan kebudayaan, fungsi pendidikan bersifat ambivalen (mendua), yaitu sering diistilahkan dengan kata *change and continuity* (perubahan dan kesinambungan). Di satu sisi, pendidikan berfungsi untuk mendorong peserta didik ke arah perubahan yang diinginkan, termasuk di dalamnya internalisasi nilai-nilai modern. Di sisi lain, pendidikan berfungsi juga mendorong peserta didik untuk tetap meyakini keberatan sistem budayanya, termasuk internalisasi nilai-nilai dasar fundamental yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Dalam konteks ini terjadilah proses kontinuitas atau kesinambungan pelestarian nilai-nilai budaya.

Pokok Permasalahan

Dari paparan di atas, dapat disebutkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana sistem dan manajemen pendidikan kita di sekolah ataupun di luar sekolah mampu membekali peserta didik tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan sosial di kemudian hari, tetapi juga membantu upaya pengembangan diri mereka sebagai warga negara yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan sebagaimana tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional?

Kedua, apakah pendidikan sebagai upaya sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang (proses belajar mengajar) dapat diselenggarakan secara tepat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan manusia Indonesia secara keseluruhan, dengan memperhatikan adanya kesenjangan latar belakang sosial-budaya peserta didik, adanya kemajemukan masyarakat dengan aneka ragam latar belakang kebudayaannya?

Ketiga, apakah sistem pendidikan nasional ini benar-benar berfungsi untuk mewariskan berbagai unsur budaya luhur bangsa Indonesia, seperti sistem nilai produk-produk teknologi, peninggalan-peninggalan sejarah, kesenian, dan macam-macam unsur kebudayaan? Bagaimana agar komponen tersebut dapat diwariskan terus-menerus melalui pendidikan?

Keempat, bagaimana pengembangan sistem pendidikan nasional mampu mengaitkan secara harmonis nilai-nilai budaya fundamental (akar budaya) yang telah kita miliki dan nilai-nilai modern yang diperlukan untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menguasai ipteks? Di samping itu, sejauh mana manusia Indonesia mampu menghadapi dan mengelola perubahan dan perkembangan sistem nilai yang diperkirakan akan berlaku di masa depan?

Kelima, mutu pendidikan secara umum telah mengalami peningkatan. Namun, bila ditinjau dari segi pembentukan sikap dan perilaku manusianya, mutu pendidikan mengalami kemerosotan. Dalam hal ini sejauh mana peranan dan tanggung jawab para pendidik, muatan kurikulum nasional maupun lokal, proses belajar mengajar, metode, sarana dan prasarana pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik?

Keenam, pada dasarnya pendidikan nasional kita dewasa ini telah diaktualisasikan berdasarkan akar budaya bangsa, tetapi kondisinya masih jauh dari budaya yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh *cultural-message*-nya kurang ditanamkan dalam proses belajar mengajar, di antaranya ialah: (1) guru yang belum memenuhi fungsi utamanya sebagai pendidik, (2) kurikulum yang kurang memperhatikan kandungan aspek afektif, (3) sarana, prasarana, dan dana yang kurang memadai, (4) metodologi pengajaran yang kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ipteks, dan (5) guru yang kurang inisiatif, kreatif, dan mengembangkan pribadi sebagai panutan/teladan.

Strategi Pemecahan

Beberapa pokok permasalahan yang dihadapi secara teknis-edukatif perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan. Yang lebih penting lagi, kita harus mewujudkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun strategi pemecahan dalam rangka mewujudkan sistem dan manajemen pendidikan berdimensi multikultural adalah sebagai berikut.

Pertama, sekolah yang merupakan pusat kebudayaan dan kampus sebagai masyarakat ilmiah, keduanya merupakan pusat pembinaan budaya, di samping keluarga dan masyarakat yang perlu lebih dikembangkan lagi. Sekolah sebagai wadah utama untuk mengembangkan kebudayaan, yaitu mengembangkan perwujudan logika, etika, dan estetika, serta praktika, sehingga peserta didik terbantu untuk menguasai pengetahuan, mampu mengadakan pilihan-pilihan hidup serta sanggup berkomunikasi secara tepat. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia pembangunan yang bertanggung jawab, menjadi manusia Indonesia seutuhnya, dan dapat mewujudkan peradaban bangsa yang luhur.

Kedua, pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai tempat pendidikan pertama dan wahana sosialisasi perlu dikembangkan agar lebih mampu meletakkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan pengenalan agama dan budi pekerti, serta dasar pergaulan. Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu peletakan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta.

Ketiga, sistem pendidikan yang berdimensi multikultural harus dapat mengukuhkan kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan persatuan yang terdiri atas simbol-simbol dan pranata sosial. Dalam setiap kebudayaan terdapat simbol-simbol dan pranata yang menjadi nilai-nilai inti (*core-values*). Simbol-simbol tersebut berasal dari kebudayaan asli dan kebudayaan yang telah dikembangkan, termasuk kebudayaan yang datang dari luar sebagai nilai-nilai baru. Untuk itu, nilai inti tadi perlu ditanamkan melalui penghayatan dan pengamalannya dalam menghadapi derasnya pengaruh budaya global baik melalui difusi maupun kontak-kontak langsung.

Keempat, untuk mengatasi terjadinya pemerosotan mutu pendidikan dari segi pembentukan sikap dan perilaku manusianya, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain: (a) mendidik/melatih kembali guru/dosen dengan membekali guru/dosen dengan pengetahuan budaya, (b) menanamkan kesadaran kepada penyelenggara pendidikan tentang arti pentingnya keteladanan mereka sebagai pamong, (c) menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya fungsi pendidikan dalam keluarga, dan (d) perlu dikembangkan hubungan yang harmonis antara penyelenggara pendidikan dengan orang tua peserta didik.***

Penulis adalah dosen FPBS Universitas Pendidikan Indonesia